

Daftar Isi

	Daftar Isi	☺
	Pedoman Transliterasi Arab-Latin	☺
	Pengantar Redaksi	☺
	<i>Moh. Khusnu Amal, S.Ag, M.Si</i>	☺
Tren Modern Perilaku Politik Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru (<i>Kasus NU Jember, Jawa Timur</i>)	1 - 12	
	<i>Drs. Abd. Halim Soebahar, MA</i>	☺
Kesiapan Madrasah Menyongsong Otonomi Daerah di Kabupaten Situbondo	13 - 24	
	<i>Drs. Abd. Qudim, HS</i>	☺
Peran Serta Siswa SMU Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember	25 - 34	
	<i>Drs. Mahfudz Siddiq, M.Pd</i>	☺
Pengaruh Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Guru SMU Negeri di Kabupaten Jember	35 - 44	
	<i>Muhibbin, S.Ag</i>	☺
Pola Dakwah Pembina Iman Tauhid Islam (PTI) Kepada Masyarakat Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember	45 - 54	
	<i>Syamsun Ni'am, M.Ag</i>	☺
Gagasan Mistik K.H. Achmad Shiddiq (<i>Menguak Ide Tentang Modernisasi Tasawuf</i>)	55 - 62	
	<i>Babun Suharto, SE, MM</i>	☺
Pengaruh Perilaku Pemimpin, Motivasi dan Lingkungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada BAPPEDA Kota Probolinggo	63 - 74	
	<i>Drs. Ahmad Mutohar, AM</i>	☺
Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa STAIN Jember	75 - 82	
	<i>Drs. Ali Saifullah, M.Pd</i>	☺
Manajemen Perilaku Organisasi Mahasiswa STAIN Jember	83 - 88	
	<i>Drs. Munif Widodo</i>	☺
Islam dan Transformasi Budaya Keluarga Pemulung di Kota Administratif Jember	89 - 97	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. KONSONAN

ع = ' (alif)	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = SY	ل = L
ث = TS	ص = SH	م = M
ج = J	ض = DL	ن = N
ح = <u>H</u>	ط = TH	و = W
خ = KH	ظ = ZH	ه = H
د = D	ع = ' (ayin)	ي = Y
ذ = DZ	غ = GH	ة = <u>I</u>
ر = R	ف = F	

II. VOKAL PENDEK

ا = a
ي = i
و = u

III. VOKAL PANJANG

او = û
وي = î
وا = â

IV. DIFTONG

او = au
وي = ai

V. PEMBAURAN

ال = al
الش = al-sy..
وال = wa al

Pengantar Redaksi

Mengawali edisi 2003, redaksi "Fenomena" kembali menyajikan suguhan yang terbaik untuk para pembaca. Kegagalan dan kekurangan selama edisi-edisi sebelumnya dapat dijadikan bahan evaluasi dewan redaksi untuk menyajikan yang terbaik bagi pembaca. Edisi perdana tahun 2003, "Fenomena" masih menghadirkan berbagai temuan ilmiah yang masih aktual. Perbedaan tema-tema penelitian yang diangkat bukan berarti tidak terfokusnya isi "Fenomena" yang disajikan, tapi lebih disebabkan oleh kecenderungan para peneliti untuk mengangkat tema penelitian.

Ragamnya tema-tema ini terkait erat dengan realitas disiplin keilmuan peneliti, seperti *Moh. Khusna Amal* mengangkat judul "Tren Modern Perilaku Politik Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru (*Kasus NU Jember, Jawa Timur*)" yang mencoba mengupas tentang keinginan NU Jember untuk mengintegrasikan peran sosial-keagamaan dan peran politiknya untuk turut membangun formasi sosial yang demokratis. Tetapi, secara praksis integrasi yang seimbang dan padu sulit untuk diwujudkan. Realitas demikian tercermin dari eksperimentasi NU Jember yang turut mendirikan PKB yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai penyediaan wadah politik bagi warganya justru berubah menjadi kendaraan politik bagi elit-elitnya. Keterlibatan NU Jember yang cukup intens ke dalam percaturan politik praktis baik melalui PKB maupun tanpa melalui PKB telah berubah menjadi tren modern perpolitikan NU Jember pasca Orde Baru yakni sebuah kecenderungan baru NU Jember untuk mengedepankan perilaku politik praktisnya dari pada pola perilaku politik kulturalnya. Begitu juga *Abd. Halim Soebahar*, mengangkat "Kesiapan Madrasah Menyongsong Otonomi Daerah di Kabupaten Situbondo", untuk mencoba membincang keberadaan madrasah ditinjau dari suprastruktur, infrastruktur, sistem pembiayaan, dan kurikulumnya belum menunjukkan kesiapannya menyongsong otonomi daerah, karena walaupun mayoritas memiliki infrastruktur, namun belum berfungsi sebagai *teamwork* dan *network* secara optimal.

Selain itu ada tema-tema lain seperti *Abd. Qadim*, mengangkat "Peran Serta Siswa SMU Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember", *Mahfudz Siddiq*, mengangkat "Pengaruh Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Guru SMU Negeri di Kabupaten Jember", *Muhibbin*, mengangkat "Pola Dakwah Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Kepada Masyarakat Muslim Tionghoa di Kabupaten Jember", *Syamsun Ni'am*, mengangkat "Gagasan Mistik K.H. Achmad Shiddiq (*Menguak Ide Tentang Modernisasi Tasawuf*)", *Babun Suharto*, mengangkat "Pengaruh Perilaku Pemimpin, Motivasi dan Lingkungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada BAPPEDA Kota Probolinggo", *Ahmad Mutohar* mengangkat "Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa STAIN Jember", *Ali Saifulloh* mengangkat "Manajemen Perilaku Organisasi Mahasiswa STAIN Jember", dan *Munif Widodo* mengangkat "Islam dan Transformasi Budaya Keluarga Pemulung di Kota Administratif Jember".

Dan terakhir, dengan memasuki tahun kedua ini, "Fenomena" menunggu berbagai kritikan yang konstruktif dari berbagai kalangan untuk memulai yang lebih baik di masa mendatang dan sekaligus menunggu sumbangan produk kegiatan riset ilmiah.

Redaksi

TREN MODERN PERILAKU POLITIK NAHDLATUL ULAMA (NU) DI ERA MULTI PARTAI PASCA ORDE BARU (Kasus NU Jember, Jawa Timur)

Moh. Khusna Amal

*Ahli Sosiologi dan Antropologi dan Sastra Arab Jurusan Dakwah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember*

ABSTRACT

Nahdlatul Ulama (NU) development, both in macro and micro level, often emerges as an actual issue that accompanied by controversial realities along time; all of this is penetrated by instable life of NU tradition socially and politically. However, this uniqueness of NU always takes us to fresh and actual discussion. The research focused on this spectacular phenomenon especially on the difference between the NU dynamic of politic during New Order and Reformation Era that claimed as back to "Khittah 1926".

This research was located in Jember based on the assumption that the district had several shifts in political behavior from cultural orientation to structural one. Empirically, this research described deeply the shifting of political behavior of NU Jember pasca the New Order only.

To support the above objectives, this research applied qualitative method using case study. NU Jember organization considered as the unit analysis, besides their politician behind this big Islamic organization. Anyhow, Jember was selected to be location of this research because of localities in which NU organization and members look progressive, militant, and sometimes radical in responding ne social change. The data were collected through participant observation, indepth interview, and documentation, where as the subjects were selected using purposive sampling. The data collected, then, analyzed qualitatively.

Kata Kunci: tren modern, perilaku politik NU, era multi partai, dan pasca Orde Baru

SEBUAH tren baru perpolitikan kembali ditampilkan Nahdlatul Ulama (NU) pasca terjadinya peralihan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, atau populer dengan sebutan pasca Orde Baru. Seperti tidak mau ketinggalan kereta, NU pun mengikuti arus besar (*mainstream*) kecenderungan masyarakat untuk menggagas pendirian sebuah partai politik

baru. PBNU di bawah kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid kemudian membentuk panitia kecil yang memiliki tugas untuk mengkaji, merumuskan, dan mempersiapkan segala perangkat untuk pendirian partai politik bagi warga NU. Hasilnya, pada tanggal 29 Rabiul Awal 1418/ 23 Juli 1998, partai baru rintisan PBNU dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ber-

hasil dideklarasikan. Untuk memperkuat posisi PKB, PBNU mengambil keputusan politik cukup penting dengan menetapkan PKB sebagai satu-satunya sayap politik resmi milik warga NU. Alasannya, agar aspirasi warga NU tidak terserak-serak ke dalam berbagai partai politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan warga NU itu sendiri dan bahkan bisa menciptakan disintegrasi internal (Alaena, 2000: 100).

Setelah PKB berhasil didirikan, dilema politik baru di lingkungan internal NU kembali muncul. NU yang sesungguhnya hanya sebagai fasilitator masih dituntut tanggung jawab moralnya untuk turut mengembangkan partai politik yang baru didirikannya itu. Terlebih lagi, pemilu 1999 yang akan memilih wakil-wakil rakyat di pentas kekuasaan nasional dan daerah akan segera digelar. PKB pun cukup sadar diri bahwa pemasok suara terbesar hanya dapat diperoleh dari warga NU yang berada di bawah otoritas para elit NU. Problema sosial-politik semacam inilah yang akhirnya menyeret elemen-elemen NU untuk turut memasuki gelanggang politik praktis dalam rangka mendukung PKB. Di samping pula karena para aktor politik di PKB kebanyakan juga pengurus NU, maka keterlibatan organisasi ini dalam melakukan gesekan dengan dunia politik praktis pun kian menguat. Dukungan NU terhadap kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam mengeluarkan Dekrit Presiden dan pengerahan massa dalam skala besar guna mempertahankan eksistensi kepemimpinan Abdurrahman Wahid merupakan realitas empirik yang mengindikasikan kecenderungan pergeseran perilaku politik NU ke zona struktural (*structural oriented*) yang sarat dengan muatan kepentingan politik praktis. Pergeseran, tampak terlihat pula dari peran politik NU yang dikenal independen dan oposan menjadi partisan, dan dari politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan (Moesa, Jawa Pos 12/10/2002).

Kesan pergeseran perilaku politik kultural NU pasca Orde Baru tampak terlihat pula pada organisasi NU di daerah, termasuk dalam hal ini adalah perilaku politik yang ditampilkan NU Jember, Jawa Timur. Tulisan ini akan menguraikan secara garis besar dan kualitatif mengenai

persoalan tren modern perilaku politik NU Jember di era multi partai pasca Orde Baru yang dinilai cenderung mengalami pergeseran ke arah *structural oriented*

Kerangka Teori

Secara konseptual, perilaku politik dapat dimengerti sebagai tindakan interaksi yang berlangsung antara pembuat aturan dan pelaksana aturan dalam kerangka perwujudan kepentingan umum (*public interest*) dan kebaikan bersama (*public good*) dalam suatu masyarakat yang mendiami wilayah tertentu (Surbakti, 1999: 10-11). Sesungguhnya, tindakan interaksi politik tidak hanya mengarah kepada realisasi gagasan-gagasan ideal perpolitikan. Dapat dipastikan, praktek politik melibatkan aspek-aspek kepentingan yang sifatnya politis seperti persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan yang dianggap penting. Dalam konteks ini, Mohtar Maso'ed (1997: 75-76) berpendapat bahwa setiap diskursus mengenai perpolitikan pasti melibatkan dimensi kekuasaan.

Terdapat dua paradigma perilaku politik yang populer dewasa ini, yaitu perilaku politik praktis dan perilaku politik non-praktis. Menurut Kuntowijoyo (1997: 21), kegiatan politik dapat dikategorikan ke dalam perilaku politik praktis manakala kegiatan tersebut dilakukan dengan memasuki dan memakai struktur teknis seperti birokrasi, lembaga negara, partai politik, dan semua usaha yang mengarah kepada pengambilan keputusan politik. Secara umum, perilaku politik praktis memiliki kecenderungan kepada perolehan kedudukan-kedudukan di struktur perpolitikan praktis seperti lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi-organisasi politik. Setiap kegiatan yang berorientasi kepada upaya-upaya untuk dapat menempatkan diri, teman, kelompok dalam kedudukan politik (Legislatif = Parlemen, Eksekutif = Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan sebagainya atau Yudikatif = Peradilan, Hakim, Mahkamah dan lain-lain) semacam itu masuk ke dalam kategori perilaku politik praktis (Muzadi, 1999: 13).

Sementara, perilaku politik non-praktis

atau perilaku politik dengan corak kultural itu terkait dengan kegiatan-kegiatan perpolitikan yang perorangan, kelompok, dan organisasi non-politik yang berusaha mempengaruhi dan mengontrol setiap proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan-keputusan pemerintah menyangkut kepentingan publik yang dilakukan tidak dengan cara mengambil peran turut masuk ke dalam struktur perpolitikan praktis. Menurut Kuntowijoyo (1997: 21-22), identitas perilaku politik kultural terpaut dengan strategi kemasyarakatan yang digunakan. Nama satuannya disebut kultural karena sangat tergantung pada perkembangan dalam masyarakat, yang kurang lebih bersifat normatif, apa yang harus. Ralp Linton menyebutnya dengan *designs for living* atau kerangka kehidupan, suatu garis besar dari perilaku sosial. Pola-pola perilaku politik kultural semacam ini banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) --yakni organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa pada saat yang bersamaan berkeinginan untuk memperoleh jabatan publik (Karim, 1995: 32; Surbakti, 1999: 109)-- seperti organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kependidikan dan organisasi-organisasi non-politik.

Kedua paradigma perilaku politik tersebut di atas cukup penting untuk dapat digunakan sebagai kerangka teoritis dalam memahami pola perilaku politik yang ditampilkan organisasi NU. Sebagaimana dimaklumi, NU dalam perkembangan sejarahnya telah menampilkan pola perilaku politik yang memiliki kecenderungan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pernah NU menampilkan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang konsen dengan gerakan atau perilaku politik kulturalnya. Perilaku politik dengan corak kultural ini pernah dieksperimentasikan NU pada awal kelahiran organisasi ini (31 Januari 1926) dan pada saat NU memproklamkan diri kembali ke khittah 1926 pada Mukhtar Situbondo tahun 1984. Secara makro, aktivitas perpolitikan NU diorientasikan kepada pemberdayaan *civil society* yang nyata dari pada perebutan kapling kekuasaan (Bruinessen, dalam

Ellyasa KH. Darwis (ed.) 1997: 77).

Sedangkan, model perilaku politik dengan pendekatan struktural mulai dipraktekkan NU pada saat organisasi ini mulai menggumuli perpolitikan baik dalam kapasitasnya bergabung secara formal dengan partai politik yang ada maupun merubah dirinya menjadi partai politik. Menurut catatan Greg Fealy dan Greg Barton (1997: xiv), relasi NU dengan politik (praktis) mulai tampak intens pada akhir 1930-an. Pada saat itu, NU bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lain dalam kampanye menentang regulasi-regulasi pemerintah kolonial yang banyak dinilai memusuhi Islam. Saat itu, NU juga aktif mendukung pembentukan GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dan seruan untuk membentuk parlemen Indonesia tahun 1939 (Haris, 1990: 3). Sampai akhirnya, tahun 1945 NU baru mulai merambah politik formal sebagai unsur organisasi dari partai Islam Masyumi. Kecenderungan dominan perilaku politik praktis NU sangat tampak ketika NU memutuskan hubungan dengan Masyumi (1952), dan mendirikan partai politik tersendiri yang diberi nama Partai Nahdlatul Ulama (PNU), sampai periode fusi yang dilakukan NU ke dalam PPP (1971).

Kedua paradigma perilaku politik di atas tidak cukup untuk melihat kecenderungan perilaku politik NU pasca Orde Baru apabila dikaitkan dengan status keorganisasian NU. Sebab, secara organisatoris, NU pasca Orde Baru tetap mempertahankan status dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan. Pada saat bersamaan, NU pun terlibat aktif pula dalam memainkan peran politiknya melalui PKB. Aktivitas perpolitikan NU melalui sayap politik yang didirikannya inilah yang sesungguhnya menentukan kecenderungan pergeseran perilaku politik kultural NU pasca Orde Baru. Kenyataan yang saat ini sulit dihindarkan adalah segala aktivitas perpolitikan praktis PKB sebagian besar merupakan representasi atau miniatur dari politik NU.

Kecenderungan NU untuk selalu menampilkan pola perilaku politik yang berbeda-beda ini terkait dengan eksistensi NU sebagai aktor sosial yang cukup aktif dan responsive dalam

melakukan interaksi dengan perubahan sosial yang ada di luar dirinya. Perkembangan internal pada dirinya akan membawa pengaruh terhadap perubahan pola perilaku politik yang ditampilkannya. Dan, perubahan realitas eksternal pun akan turut membentuk karakter perilaku politiknya. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa produk perilaku politik NU yang cenderung berubah-ubah itu terbangun dari sebuah proses dialektik antara NU sebagai aktor sosial yang memiliki kebebasan dalam merumuskan format perilaku politiknya dengan perubahan realitas eksternal. Kesan ketidakajegan perilaku politik yang ditampilkan NU dari waktu ke waktu itulah yang menunjukkan dinamika perpolitikan NU di mana keputusan NU untuk menampilkan satu model perilaku politik itu tidak hanya terkait dengan kebebasan NU sebagai aktor sosial, melainkan sekaligus sarat dengan muatan situasi dan kondisi yang tengah berkembang. Meminjam bahasa Mitsuo Nakamura (1997: 73), tindakan politik NU itu cukup kontekstual dan secara situasional sangat selektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus (*case study*) dengan corak deskriptif-eksploratif. Kasus-kasus perpolitikan NU Jember yang dikaji berada pada pusran periode pasca Orde Baru yakni mulai dari awal terjadinya proses reformasi sampai saat sekarang ini, dengan memilih beberapa kasus yaitu (1) kasus keterlibatan NU Jember dalam partisipasinya membentuk PKB yang diklaim sebagai sayap politik resmi warga NU; (2) kasus keterlibatan NU Jember dalam memobilisir massa pada pemilu 1999 dan pembentukan pasukan berani mati; (3) kasus keterlibatan NU Jember dalam proses pemilihan Bupati Jember periode 2000-2005; dan (4) kasus keterlibatan NU Jember dalam proses pembentukan pemerintahan kota (Pemkot).

Untuk mendeskripsikan potret pergeseran perilaku politik kultural NU Jember pasca Orde Baru secara utuh, dipandang perlu membongkar realitas historik perpolitikan NU Jember pada era pasca Orde Baru, dengan mempergunakan

bantuan pendekatan historik, dengan fokus penelitian tetap diorientasikan kepada pengkajian terhadap fenomena aktual tentang perpolitikan NU Jember yang merupakan karakteristik dari model studi kasus itu sendiri (Yin, 1997: 8). Sedangkan telaah realitas perpolitikan organisasi NU Jember sekaligus diarahkan kepada perilaku politik aktor-aktor yang ada di balik organisasi tersebut, sebab dalam pandangan teori tindakan sosial tentang aktor (subjek yang bertindak), di belakang setiap organisasi, kelompok dan lembaga itu terdapat individu-individu konkrit yang membuat berbagai keputusan (individu bukanlah subjek pasif) yang bereaksi terhadap nilai-nilai di luarnya dan kondisi-kondisi struktural yang melingkupinya (Andrian, 1992: 14).

Organisasi NU Jember dan aktor-aktor yang ada di belakangnya secara bersama-sama diambil sebagai unit analisis (objek kajian), karena untuk memahami NU yang rumit menurut Kacung Marijan (1992: 223-224) tidak cukup hanya memandangnya sebagai organisasi, tetapi harus memandangnya sebagai sub-kultur, karena NU sendiri lahir dari kultur masyarakat yang menganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Pada saat bersamaan, sering perilaku NU itu tidak rasional secara organisasional, tetapi cukup rasional secara kultural.

Jenis, Sumber dan Penggalian Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain adalah kondisi geografis dan demografis daerah Jember sebagai lokasi penelitian yang meliputi aspek lokasi daerah Jember, kondisi kependudukan, pendidikan, perekonomian masyarakat, sosial-keagamaan, dan kehidupan politik. Jenis data ini peneliti kelompokkan ke dalam klasifikasi data yang peneliti sebut dengan "tipologi geografis dan demografis".

Data tersebut digali dari sumber dan melalui teknik dokumentasi terutama dokumen hasil olahan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, kepustakaan, pengamatan, wawancara dengan tokoh-tokoh di jajaran struktur pemerintahan, dan tokoh-tokoh informal yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan

tersebut. Jenis data model ini peneliti klasifikasi ke dalam tipologi “institusional atau organisasional”.

Untuk menunjang kelengkapan data, dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh NU Jember melalui metode *life history*, dengan penggabungan dua model wawancara yakni: *pertama*, wawancara terstruktur (*structured interview*) yang ditempuh dengan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan draf pertanyaan penelitian dalam bentuk *check list*, dan *kedua*, wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) untuk menjaring informasi seluas mungkin dari informan tanpa secara ketat terpaku pada tata urutan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam *check list*. Secara operasional, wawancara tak terstruktur ditempuh melalui wawancara terfokus (*focused interview*) yakni wawancara yang terpusat pada satu pokok yang tertentu dan dikombinasikan dengan wawancara bebas (*free interview*) yakni wawancara yang tidak memiliki pusat, tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke pokok lain (Koentjoroningrat, 1989: 139).

Data yang berbicara mengenai pergeseran perilaku politik kultural NU Jember terdiri dari kasus tindakan NU Jember turut berpartisipasi membidani kelahiran PKB yang kemudian diklaim sebagai satu-satunya partai politik milik warga NU; kepentingan politik NU Jember membentuk saluran politik formal berupa PKB; keterlibatan tokoh dan warga NU Jember dalam berpartisipasi membesarkan PKB; dan kasus keterlibatan NU Jember dalam melakukan persinggungan dengan perpolitikan praktis di tingkat lokal seperti peran tokoh-tokoh NU Jember memobilisir massa dalam peristiwa kampanye pemilu 1999 dan pembelaan terhadap Abdurrahman Wahid, keterlibatan NU Jember dalam percaturan pemilihan Bupati Jember, dan tindakan NU Jember melibatkan diri dalam masalah pembentukan Pemerintahan Kota (Pemkot). Jenis data ini peneliti klasifikasikan ke dalam “tipologi tindakan”.

Sedangkan data tentang peristiwa yang tengah berlangsung, peneliti gali melalui teknik pengamatan terlibat (*participant observation*).

Penggalian data yang lain ditempuh melalui pembentukan *focus group discussion* (FGD) dengan jalan mengundang beberapa orang yang memiliki kompetensi dalam menyoroti subjek permasalahan, maupun dengan teknik peneliti mengikuti diskusi-diskusi kelompok yang dilangsungkan oleh kelompok-kelompok diskusi NU Jember seperti kelompok Lembaga Dakwah NU Jember (LDNU), Lembaga Pemberdayaan Sumberdaya Manusia NU Jember (Lakpesdam), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember (PMII), Kelompok Muda NU Jember (KMNU), dan lain sebagainya. FGD itu dilakukan tanggal 12 Nopember 2002 di sekretariat Lembaga Kajian Jumat Mangli (eLKJM).

Penetapan Informan

Strategi penentuan informan merujuk kepada kompetensi mereka untuk dapat memberikan informasi mengenai fokus masalah yang dikaji, dengan memusatkan kepada makna yang ditafsirkan berdasarkan ungkapan-ungkapan para informan secara mendalam, dan tidak berorientasi kepada perekrutan kuantitas informan yang menjadi subjek penelitian (Maxwell 1996).

Orang-orang yang dijadikan informan adalah:

1. Tokoh-tokoh struktural NU Jember yang aktif di organisasi.
2. Tokoh-tokoh struktural NU Jember yang duduk di parlemen dan partai politik daerah.
3. Tokoh-tokoh non-struktural baik organisatoris maupun politisi NU Jember.
4. Tokoh-tokoh organisatoris yang memiliki hubungan struktural dengan NU Jember (Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Muslimat dan Fatayat).
5. Tokoh-tokoh organisatoris yang memiliki hubungan kultural dan historik dengan NU Jember yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
6. Tokoh-tokoh muda (cendekiawan/intelektual) NU Jember yang memiliki perhatian terhadap NU Jember tapi tidak masuk ke dalam lingkaran organisasi baik NU politik maupun NU struktural.

7. Warga masyarakat NU Jember secara umum.

Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, untuk keperluan analisis digunakan prosedur induktif, dengan pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, gambar, dokumen berupa laporan, artikel, arsip, informasi dari para informan dan berbagai catatan yang lain. Tindakan analisis data ini sendiri secara simultan terkait langsung dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan secara naratif (Creswell, 1994: 153).

Secara operasional, teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 15-20) dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi data dengan melakukan pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Untuk keperluan ini, informasi yang berasal dari tokoh-tokoh dalam struktur keorganisasian atau kepengurusan NU Jember disilangkan dengan informasi yang diperoleh dari praktisi politik NU Jember di PKB, tokoh-tokoh kultural NU Jember yang berada di luar jalur struktur keorganisasian maupun perpolitikan, kelompok (cendekiawan) muda NU Jember dan informasi dari tokoh-tokoh sub-organisasi NU Jember yang lain. *Kedua*, penyajian data dengan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan peranan tokoh-tokoh NU Jember, peranan kelompok (cendekiawan) muda NU Jember, peranan aspirasi warga NU Jember dan pengaruh konteks sosio-politik perubahan kebijakan perpolitikan pemerintah terhadap pergeseran perilaku politik kultural NU Jember masa pasca Orde Baru.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum atau general.

Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil kasus NU dengan lokasi di daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan beberapa pertimbangan penting yaitu: (1) keadaan sosial dan keagamaan masyarakat Jember yang mayoritas merupakan warga NU yang dikenal militan; (2) kondisi politik daerah Jember yang kurang menempatkan warga NU secara proposional dalam struktur Pemerintahan Daerah; (3) survei awal menunjukkan adanya kecenderungan bahwa NU Jember mengalami pergeseran dalam hal aktivitas perpolitikannya dari perilaku politik yang sifatnya kultural ke arah perilaku politik yang bersifat struktural; dan (4) status penelitian yang lebih bersifat mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan PKB: Titik Awal Pergeseran Perilaku Politik Kultural NU Jember

Mengacu kepada perspektif teori tindakan sosial sebagaimana diungkapkan di atas, maka NU Jember dapat diposisikan sebagai aktor sosial yang secara subjektif memiliki kemampuan untuk menentukan corak perilakunya sesuai dengan selera atau tujuan yang dikehendakinya (Johnson, 1986: 220). Partai politik itu sendiri dapat dimengerti sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk merealisasikan tujuan yang dikehendaki aktor (NU Jember). Jadi, keputusan NU Jember itu untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan partai politik bagi warga NU mencerminkan cukup tegas akan keberadaannya sebagai aktor yang punya kemampuan menetapkan tindakan berdasarkan berbagai orientasi dan pertimbangannya.

Terdapat beberapa kecenderungan yang melatari keinginan NU Jember turut mendorong PBNU mendirikan partai politik yang antara lain berupa keinginan NU Jember turut menyediakan wadah politik bagi warganya guna menyalurkan aspirasi politiknya. Sebab, selama ini aspirasi warga NU Jember yang tergolong cukup besar hanya berfungsi sebagai penyumbang suara bagi partai-partai politik milik orang lain.

Kecenderungan NU Jember juga termotivasi untuk turut berperan secara langsung dalam

proses penataan sistem kehidupan politik yang demokratis. Ditengarai, peran partisipasi politik NU Jember dari luar struktur kekuasaan tidak cukup efektif dan strategis dalam proses pembangunan demokratisasi. *Paling banter*, NU Jember hanya bias *berkoar-koar* dari luar tanpa bisa berbuat banyak. Padahal, mayoritas masyarakat Jember berasal dari warga NU yang secara ideal seharusnya dapat memainkan peran politik yang cukup besar pula. Singkatnya, orientasi *representative government* pun dilihat sebagai pertimbangan yang besar yang pada akhirnya mewarnai keputusan NU Jember untuk turut mendirikan partai politik.

Orientasi peran ini, semakin diperkuat dengan memori historis pengalaman perpolitikan NU Jember yang kurang menegakkan terutama pada masa integrasi dengan Masyumi dan ketika NU harus dipaksa fusi dengan PPP pada masa Orde Baru. Secara makro, pengalaman politik NU Jember pada masa-masa itu cenderung termarginalisasikan. Pada saat bersamaan, NU Jember juga pernah merasa menikmati kejayaan politiknya pada masa NU Jember berstatus menjadi partai politik yakni PNU Cabang Jember. Kedua pengalaman politik ini sekan menggugah kembali memori NU Jember saat ini untuk bangkit dari keterpurukan politiknya dan berusaha menggapai kembali supremasi kejayaan politiknya.

Semua orientasi yang dikemukakan para informan di atas merupakan dasar argumentasi kenapa NU Jember memutuskan untuk mengambil tindakan politik berupa partisipasi dalam mendirikan partai politik pasca Orde Baru. Pilihan tindakan NU Jember dalam proses pembentukan partai politik milik warga NU ini dapat dimengerti sebagai suatu potret pilihan tindakan yang memang rasional karena memiliki tujuan dan alat yang jelas untuk mencapai tujuan yang dikehendaki baik yang bercorak ideal, historis, maupun pragmatis. Seperti yang dikemukakan Weber bahwa suatu tindakan dikatakan rasional apabila tujuan, alat untuk mencapai tujuan, dan akibat-akibatnya dipertimbangkan dan diperhitungkan secara sadar dan rasional (Johnson, 1986: 220).

Pertimbangan rasional elemen NU Jember dalam menggagas alat (partai politik) dan strategi untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya, misalnya, tercermin dari serangkaian kegiatan berupa diskusi, pembangunan opini publik, penggodogan *platform* partai politik yang diusulkan kepada PBNU. Tokoh-tokoh sekaliber K.H. Yusuf Muhammad dan K.H. Muhiid Muzadi serta para insan akademisi dan aktivis NU Jember turut memainkan peran dalam proses pembentukan partai politik. Gerakan ini terbukti cukup strategis untuk membuka ruang kemungkinan bagi NU untuk mendirikan partai politik yang tercermin dari responsibilitas PBNU dalam memfasilitasi pembentukan partai politik. Sampai akhirnya, partai politik milik warga NU dengan nama PKB pada tingkat nasional berhasil dideklarasikan. Tidak lama kemudian, NU Jember yang saat itu berada di bawah kepemimpinan H. Mukhson Sudjono bergegas untuk mendeklarasikan PKB Cabang Jember yang dilakukan di Pondok Pesantren Sumberwringin pimpinan K.H. Khatib Umar.

Jelas, pilihan tindakan politik yang dilakukan NU Jember itu mencerminkan keinginan subjektif dalam merealisasikan tindakannya yang dikatakan rasional. Akan tetapi, apa yang dilakukan NU Jember semakin menegaskan keberadaan dirinya sebagai aktor sosial yang memiliki kemampuan bebas untuk menciptakan perilaku politik baru dan melakukan perubahan pada kondisi-kondisi struktural, dan bukan sebagai aktor pasif yang dibentuk oleh struktur sosial sebagaimana pandangan kaum strukturalisme (Nashir, 2000: 26-27). Namun demikian, apabila dicermati akan tampak bahwa perilaku politik yang ditampilkan NU Jember bukan se-mata-mata potret tindakan yang berorientasi subjektif belaka. Momentum perubahan sosial-politik bangsa merupakan realitas objektif yang memiliki peran pula dalam mendorong NU Jember untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan partai politik.

Kebebasan berkehendak maupun menentukan tindakan politik pada diri NU Jember telah menjadikan dirinya semacam aktor sosial yang benar-benar memiliki kemampuan untuk ber-

tindak secara luas seperti keterlibatannya ke dalam percaturan politik praktis. Satu contoh yang konkrit adalah gerakan mobilisasi massa yang dilakukan elit NU Jember guna mendukung kemenangan PKB Jember dalam kompetisi pemilu 1999. Tindakan politik ini pun didasarkan kepada argumentasi yang cukup rasional yakni pembelaan dilakukan atas dasar realitas bahwa PKB itu anak kandung NU, maka dari itu mustahil NU Jember akan berdiam diri membiarkan PKB bekerja sendirian.

Secara tidak sadar, tindakan-tindakan politik NU Jember dalam mengurus PKB menyeret dirinya ke wilayah politik praktis. Keasikan aktivitas perpolitikan yang dilakukannya telah memalingkan dirinya dari urusan-urusan sosial-keagamaan, dan cenderung memprioritaskan persoalan politik praktis. Dan, intensitas NU Jember dalam melakukan persinggungan dengan dunia politik praktis mulai memunculkan bangunan politik yang menghantarkan NU Jember sebagai aktor sosial-politik baru yang memiliki keleluasaan untuk memasuki percaturan politik praktis. Sehingga tidak berlebihan apabila peng gagasan dan pembentukan PKB itu ditandai sebagai titik awal NU Jember memasuki gerbong politik praktis. Karena, kenyataannya NU Jember tidak mampu memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pembentukan PKB, melainkan menempatkan diri sebagai aktor yang turut bermain politik.

Setelah NU Jember Memiliki Partai Politik Sendiri

Keinginan NU Jember untuk turut menyediakan wadah politik bagi warganya memang sudah terpenuhi dengan dideklarasikannya PKB Cabang Jember. Permasalahannya, justru dengan memiliki partai politik sendiri NU Jember mulai tergoda untuk tidak sebatas sebagai deklarator ataupun fasilitator PKB. Terlihat, NU Jember mulai tergoda untuk memasuki zona perpolitikan praktis lewat PKB. Bahkan, ketika PKB diniali kurang aspiratif lagi terhadap baik warga NU maupun elitnya, maka NU Jember melakukan permainan politik dari luar struktur PKB. Terdapat beberapa agenda politik praktis

yang menyeret NU Jember untuk terlibat aktif di dalamnya. Di antara yang terpenting dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

Dari Mobilisir Massa Pada Pemilu 1999 Sampai Pembentukan Pasukan Berani Mati

Gerakan mobilisasi massa yang dilakukan NU Jember melalui elit-elitnya dimaksudkan untuk membantu PKB memenangkan pemilu 1999. Karena, massa terbesar PKB itu adalah warga NU yang berada di bawah otoritas para kiai. Untuk menggerakkannya tidak mungkin dilakukan para elit politisi PKB tanpa keterlibatan kiai. Sementara itu, praktek mobilisasi massa lewat kampanye yang dilakukan tokoh-tokoh NU Jember itu sendiri kerap mengusung sentimen ideologis dan simbol-simbol keagamaan serta pernyataan politik partisan seperti ungkapan bahwa PKB itu satu-satunya partai yang didukung penuh para ulama NU, maka dari itu memilih PKB bagi warga NU itu adalah *farḍlu 'ain*. Dikaitkan dengan pendapat Geertz, tindakan politik NU Jember yang masih mendasarkan kepada sentimen ideologis keagamaan untuk kepentingan politiknya itu menunjukkan adanya watak dari pola perilaku politik aliran, yakni suatu kekuatan politik yang didasarkan kepada ideologi sebagai perekatnya (Efendy, 2000: 363).

Keterlibatan praksis NU Jember melalui elit-elitnya terbukti menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan PKB (lihat tabel 1). Tercatat, PKB Jember berhasil menempatkan diri pada peringkat pertama perolehan suara dengan 17 kursi. PDI-P berada di urutan kedua dengan perolehan 11 kursi, Partai Golkar 4 kursi, PPP 4 kursi, PAN 2 kursi, Partai Sunni 1 kursi, PKU 1 kursi, dan TNI/POLRI 5 kursi (Kahumas Kabupaten Jember: 13).

Kemenangan NU dan PKB Jember dalam menempatkan diri pada peringkat pertama perolehan suara semakin memantapkan kedua organisasi itu untuk terus terlibat dalam perpolitikan praktis. Terlebih lagi, dengan terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI keempat hasil pemilu 1999 semakin membuka ruang tersendiri bagi tokoh-tokoh dan kader NU Jem-

ber untuk berebut mencari *cantolan* politik ke pusat-pusat kekuasaan, terlibat konflik dalam perebutan jabatan-jabatan yang dianggap basah,

yang menolak pelengseran Wahid melalui Sidang Istimewa (SI).

Tabel 1
KOMPOSISI SUARA DPRD JEMBER

PARPOL	KURSI	PROSENTASE	FRAKSI
PKB	17	37,7	F-KB
PDIP	12	26,6	F-PDIP
TNI/POLRI	5	11,1	F-TNI/POLRI
PPP	4	8,8	F-PAU
GOLKAR	4	8,8	F-KS
PAN	2	4,4	F-PAU
PNU	1	2,2	F-KS
TOTAL	45	100 %	5 FRAKSI

Keterangan:

F-PAU : Fraksi Persatuan Amanat Umah

F-KS : Fraksi Karya dan Sunni

dan menjadi *brooker* atau (*middleman*) kekuasaan. Menurut Zainul Munasichin (Jurnal Gerbang, 2002: 50), NU Jember dalam banyak hal pada periode kepemimpinan Wahid betul-betul telah menegara atau dekat sekali dengan poros kekuasaan.

Demikian pula, ketika *cantolan* politik bagi warga NU di pusat yakni Abdurrahman Wahid mulai kehilangan kemapanannya akibat aksi sosial yang menghendaki Wahid turun dari jabatannya, maka NU Jember seperti tidak mau ketinggalan untuk turun mem-*back up*-nya. Tampak sekali perilaku politik warga NU Jember dalam mendukung kepemimpinan Wahid, cenderung radikal. Aksi penebangan pohon, pemboikotan jalan, dan pembentukan pasukan berani mati (PBM), cukup dominan mewarnai aksi radikalisme perilaku politik NU Jember pasca Orde Baru. Meminjam terminologi Mitsuo Nakamura, tampilan perilaku politik NU Jember pada akhir masa pemerintahan Wahid dapat dikategorikan kembali berada dalam "fase radikal". Radikalisme perilaku politik NU Jember itu tidak hanya tampak di luar parlemen, tetapi juga di dalam parlemen seperti pertentangan yang cukup keras para politisi NU dari PKB

Kasus Keterlibatan NU Jember dalam Pemilihan Bupati

Persoalan pemilihan Bupati Jember merupakan isu politik yang sangat menarik minat politik NU Jember bersama PKB untuk turut berkompetisi memperebutkannya. Meminjam bahasa salah seorang informan, cukup sayang dan amatlah bodoh apabila NU Jember mewatikan begitu saja kontestasi pemilihan bupati.

Tindakan politik serius pun kemudian diambil NU Jember bersama PKB untuk merealisasikan angan-angan politiknya tersebut. Dari serangkaian pembicaraan dan proses penyaringan

bakal calon yang hendak dimunculkan, akhirnya sosok K.H. Yusuf Muhammad --seorang kiai terkemuka di Jember, pengurus PBNU, dan PKB Pusat--, akrab dipanggil Gus Yus disepakati untuk dicalonkan menjadi kandidat dalam pemilihan bupati. Sebagian besar ulama NU Jember dan para politisi NU di PKB sudah merestui pencalonan Gus Yus. Tetapi, ada pula sementara ulama yang kurang sepakat dengan tampilnya Gus Yus menjadi kandidat bupati karena jabatan bupati dianggap bukan *maqam*-nya Gus Yus. Sebab, apabila Gus Yus benar-benar terpilih sebagai bupati, maka tidak akan ada masyarakat yang bisa mengontrolnya.

Keinginan NU Jember bersama PKB turut mencalonkan kadernya dalam persaingan pemilihan bupati Jember periode 2000-2005 didasarkan kepada kenyataan perolehan suara PKB Jember yang mendapatkan 17 kursi atau suara. Diyakini bahwa 17 suara ini akan dapat menjadi modal politik yang cukup signifikan dalam usaha memenangkan pemilihan bupati. Sementara, sosok Gus Yus yang sudah *go national* juga dipercayai dapat mendongkrak keberhasilan NU Jember untuk merebut kursi bupati. Terlebih lagi, realitas politik dalam skala nasional yang

memunculkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang *nota bene* berasal dari unsur NU/faksi PKB yang tidak menempati urutan pertama. Kondisi semacam ini turut mendukung kepercayaan diri berlebih bagi NU Jember untuk benar-benar merealisasikan impian politiknya.

NU dan PKB Jember cukup sadar diri bahwa suara 27 belum cukup untuk dapat menghantarkan Gus Yus menduduki kursi bupati. Untuk itu, NU-PKB pun lantas melakukan koalisi dengan partai politik lain. Kebetulan yang dipilih sebagai patnernya adalah Kadarisman dengan asumsi bahwa tambahan enam suara akan dengan mudah didapatkan dari kedua fraksi politik PAN dan PPP. Apalagi, Gus Yus sudah memiliki hubungan kedekatan dengan tokoh senior PAN Jember yakni K.H. Luthfi. Tidak diragukan lagi, dua suara PAN akan diberikan kepada Gus Yus. Sementara, untuk membangun koalisi dengan PPP diyakini NU tidak banyak menimbulkan problem. Sebab, tokoh-tokoh PPP kebanyakan berasal dari kalangan *nahdliyin*.

Persoalannya menjadi sangat paradoksal ketika hasil pemilihan bupati tidak sesuai dengan skenario politik yang sudah digariskan. Hasil pemilihan bupati yang dilangsungkan pada 13 Februari 2000 cukup mengejutkan banyak pihak, khususnya NU Jember. Duet Gus Yus dengan Kadarisman yang diprediksikan akan mendapatkan kemenangan secara mudah ternyata kalah dalam persaingan pemilihan bupati. Duet kedua pasangan ini hanya berhasil mendapatkan 19 suara. Sedangkan duet Syamsul Hadi Siswoyo-Bagong Sutrisno yang sebelumnya sama sekali tidak begitu diperhitungkan, justru keluar sebagai pemenangnya dengan mengantongi 22 suara. Sedangkan 4 sisa suara lainnya diperuntukkan pasangan Zainuri-Warsono (lihat tabel 2).

Kegagalan NU Jember dan PKB dalam memperebutkan jabatan Bupati kembali membawanya untuk melakukan tindakan radikal

dengan melakukan pemboikotan dan demonstrasi besar-besaran terhadap hasil pemilihan yang dinilai cacat karena dinilai sarat dengan *money politics*. Akan tetapi, *counter* yang dilakukan NU Jember bersama PKB tidak cukup efektif

Tabel 2

HASIL VOTING PEMILIHAN BUPATI JEMBER

CABUP/CAWABUP	SUARA	SUMBER SUARA
Yusuf Muhammad - Kadarisman	19	PKB 17, PAN 2 F-PDIP
Syamsul Hadi Siswoyo-Bagong Sutrisno	22	PDIP 12, TNI/POLRI 5, PPP 4, dan PNU 1
Zainuri - Warsono Mulyadi	4	GOLKAR 4

dan strategis. Karena, hasil pemilihan tetap dikrimkan ke Jakarta yang mengakibatkan pelantikan terhadap duet Syamsul Hadi Siswoyo dengan Bagong Sutrisno dalam kapasitas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2000-2005 tetap berlangsung.

Kasus Keterlibatan NU Jember dalam Pembentukan Pemerintahan Kota

Kegagalan politik NU Jember dalam kontestasi perebutan kursi Bupati Jember periode 2000-2005 tidak membuat dirinya menjauh dari wilayah perpolitikan praktis. Tragedi politik berupa kegagalan pemilihan bupati, meski telah memberi pelajaran penting terhadap NU Jember, ternyata tidak membuatnya trauma untuk kembali berkiprah memasuki arena perpolitikan praktis. Persoalan pembentukan Pemkot merupakan isu politik yang melibatkan peran praktis NU Jember untuk ke sekian kalinya. NU Jember kemudian membentuk tim peneliti terdiri dari para cendikia, intelektual, akademisi, dan aktivis NU yang bertugas melakukan kajian secara mendalam atas layak tidaknya Jember dibentuk Pemkot.

Tawaran konseptual pemkot yang diusung NU Jember adalah berupa pemekaran wilayah dari tiga kecamatan menjadi tujuh kecamatan.

Prediksi NU, apabila pemkot cuma terdiri dari tiga kecamatan sangat jelas akan kurang memberikan keberuntungan politik bagi PKB yang secara otomatis juga bagi NU apabila kelak NU turut mendudukkan calonnya dalam perebutan kursi walikotif, demikian beberapa informan memberikan argumentasinya. Dari statemen semacam ini, sangatlah jelas bahwa keinginan NU Jember untuk turut berkiprah mengurus Pemkot bukan murni karena panggilan moral untuk memperjuangkan aspirasi elemen-elemen umat yang ada di perkotaan. Tetapi, persoalan kepentingan politik praktis jauh lebih mengedepan bila dibandingkan dengan komitmen NU untuk memberdayakan masyarakat kota.

Studi kelayakan yang telah dilakukan tim peneliti NU membuahkan hasil bahwa Jember layak untuk menjadi pemkot baik dengan tiga kecamatan maupun tujuh kecamatan. Terlepas dari kedalaman tingkat kajian yang telah dilakukan tim peneliti, tampaknya tim peneliti hanya berfungsi menjadi semacam alat legalitas dan justifikasi bagi kepentingan gerakan politik NU Jember dalam rangka pembentukan Pemkot. Apabila NU mengkritisi lebih jauh, pembentukan pemkot itu dapat merugikan NU sendiri. Sebab, basis massa NU Jember terbesar masih berada di wilayah perdesaan.

Sementara dari penelitian tim bentuk bupati yang diketuai Prof. Dr. Kabul Santoso mengasilkan simpulan bahwa Pemkot dengan tiga atau tujuh kecamatan, kedua-duanya dinyatakan layak pula. Sudah barang tentu hasil penelitian ini mengejutkan banyak pihak, terutama dari kelompoknya bupati. Bagaimana tidak, Kabul santoso yang sengaja dipasang bupati untuk membentengi hasil penelitian, ternyata kebobolan juga. Ditengarai, kebololannya tim peneliti Bupati yang diketuai Kabul karena masuknya beberapa personel NU Jember yang kemudian mewarnai hasil penelitian itu. Melihat kesimpulan hasil penelitian tersebut, Bambang Wahyudi, NU dan kelompok-kelompok yang pro-pemkot merasa sangat lega. Mereka juga sangat optimis apabila realisasi pembentukan pemkot tinggal selangkah lagi. Terlebih, pada rapat pleno DPRD pada 17 Mei 2001, FKB yang

didukung FPDIP secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Pemkot.

Akan tetapi, semua harapan dan optimisme NU dan kelompok pro-pemkot menjadi sirna. Pasalnya, pada tanggal yang sama (17 Mei 2001) tim peneliti pemkab dipanggil menghadap Panitia Musyawarah (Panmus) Dewan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di dewan. Hasil penelitian yang menyatakan Jember layak menjadi pemkot dipertanyakan oleh seorang anggota FPG, Mahmud Sardjudjono. Mahmud mempersoalkan standar angka minimal (skor) 2280 dengan mengacu kepada hasil kajian Laboratorium FISIP UI dalam kasus yang sama terhadap kotif Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di mana hal ini oleh Depdagri tidak dipersoalkan. Dalam hal ini, Mahmud tetap menolak menggunakan skor minimal tersebut dan ia menginginkan agar memakai patokan PP 129/2000 yang menetapkan skor minimal kelayakan daerah otonom adalah sebesar 3025 (Munasi-chin, Jurnal Gerbang, 2002: 68).

Sekali lagi, NU Jember kembali terjebak dalam permainan politik praktis dan mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Keterlibatan NU Jember dalam pembentukan pemkot yang sangat jelas merupakan wilayah politik praktis, kembali membawa korban yang luar biasa bagi NU Jember dan warganya. Semua energi dan potensi NU yang dikonsentrasikan kepada persaingan politik praktis tampak terasa sia-sia belaka. Sebab, pada saat NU beserta elemen kewargaannya berkonsentrasi mengurus perpolitikan praktis, pada saat itu pulalah kinerja-kinerja sosial-keagamaan atau kultural NU Jember -sedikit banyak- menjadi terabaikan. Keinginan NU Jember untuk merebut supremasi kejayaan politiknya sebagaimana pengalaman politik NU Jember ketika menjadi partaipolitik masih harus berhadapan dengan kegagalan.

PENUTUP

Keinginan NU Jember untuk mengintegrasikan peran sosial-keagamaan dan peran politiknya memang merupakan pilihan yang cukup rasional. Secara ideal, integralitas keduanya akan cukup strategis bagi NU Jember

untuk turut membangun formasi sosial yang demokratis. Tetapi, secara praktis integrasi yang seimbang dan padu sulit untuk diwujudkan. Realitas demikian tercermin dari eksperimentasi NU Jember yang turut mendirikan PKB yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai penyediaan wadah politik bagi warganya justru berubah menjadi kendaraan politik bagi elit-elitnya. Keterlibatan NU Jember yang cukup intens ke dalam percaturan politik praktis baik melalui PKB maupun tanpa melalui PKB sebagaimana kasus-kasus yang diungkap di atas telah berubah menjadi tren modern perpolitikan NU Jember pasca Orde Baru yakni sebuah kecenderungan baru NU Jember untuk mengedepankan perilaku politik praktisnya dari pada pola perilaku politik kulturalnya. Apabila pola perilaku politik NU Jember pasca Orde Baru ini terus larut ke dalam percaturan politik praktis, maka tidak menutup kemungkinan bahwa NU Jember akan semakin kehilangan legitimasinya sebagai organisasi sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaena, Badrun. 2000. *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhakidae, Daniel. 1994. Langkah Non Politik Dari Politik NU, dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LkiS.
- Effendy, Bahtiar. 2000. *Repolitisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg. 1997. Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU. dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed.) *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LkiS.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 1990. *NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid I, terjemahan R.M.Z. Lawang, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1999. Enam Alasan Tidak Mendirikan Partai Islam, dalam Mustofa (ed.) *Memilih Partai Mendambakan Presiden: Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milenium*. Bandung: Rosda.
- , 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Moesa, Ali Maschan. 2002. Refleksi Konferensi Wilayah NU Jatim NU di Tengah Tarik Ulur Politik. *Jawa Pos 12 Oktober 2002*. Surabaya: PT. Jawa Pos.
- Munasichin, Zainul. 2002. Politik NU, NU Politik: Studi Kasus Relasi NU-PKB Jember, dalam *Jurnal Gerbang 12-V Tahun 2002*. Surabaya: eLSAD.
- Muzadi, Muhid. 1999. *Jatidiri PKB*. Jember: Perc. Offset: Nuris.
- , 1998. Kaitan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa. dalam *Aula No. 08 Tahun XX*, Surabaya: PWNU Jawa Timur.
- Nakamura, Mitsuo. 1997. Tradisionalisme Radikal Catatan Muktamar Semarang 1979. Dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed.) *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Radar Jember*. Redam Gejolak, LKM Tasyakuran. 23 Oktober 1999.
- Sekjen PBNU. 1999. *Laporan PBNU Periode 1994-1999 Pada Muktamar NU ke-30 21-27 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur*. Jakarta, Kramat Raya.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, cetakan keempat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.